DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2017

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :

Dini Nuriani

7111415100

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan,	Pembimbing
Faturida, S.E., M.Sc	Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc
NIP. 198502162008122004	NIP. 198701222014041001

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Oktober 2019

Penguji I

Dr. Shanty Oktavilia, S.E., M.Si.
NIP. 197808152008012016

Penguji II

Avi Budi Setiawan, S.E., M.Si.
NIP. 198708292015041002

Penguji III

Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.
NIP. 198701222014041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

iii

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dini Nuriani
NIM	: 7111415100
Tempat Tanggal Lahir	: Kebumen, 21 Juni 1996
Alamat	: Gg. Merpati No 702 RT 4 RW 5 Wonokriyo, Gombong, Kebumen

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 29 Oktober 2019

Dini Nuriani
NIM 7111415100

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu'. - (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 45) -

Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan kegigihan. - (Samuel Jhonson) -

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, atas segala pertolongan-Nya

Saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Soderi dan Ibu Titin Ani Sulastri yang senantiasa memanjatkan doa dan memberikan semangat.
2. Kakak saya, Dian Nurani.
3. Serta Almamaterku Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017**". Penulis menyadari telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi dan doa serta dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang tela memberikan kesempatan menyelesaikan studi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Fafurida, S.E., M.Sc., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan persetujuan terhadap skripsi ini.
4. Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc., Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Shanty Oktavilia, S.E., M.Si., selaku dosen Penguji I yang telah menguji dan memberikan arahan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Avi Budi Setiawan, S.E., M.Si., selaku dosen Penguji II yang telah menguji dan memberikan arahan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Wijang Sakitri, S.Pd, M.Pd., Dosen Wali Ekonomi Pembangunan A 2015 yang senantiasa memberikan arahan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam menempuh studi.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi.
9. Kedua orang tua, kakak, serta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.

10. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2015 yang selalu memberikan semangat dan telah berkenan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
11. Teman-teman Kos Putri Tegal yang selalu memberikan semangat dan masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Jika masih ada kritik dan saran yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini dapat penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 Oktober 2019

Penulis

SARI

Nuriani, Dini. 2019. "*Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017".* Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/ Kota.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki angka indeks gini tertinggi di Pulau Jawa dan diatas rata-rata nasional artinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih parah dari Indonesia. Hal tersebut merupakan masalah serius karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data panel yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* yang diuji dengan metode analisis regresi *Fixed Effect* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS).* Pengujian secara parsial digunakan uji t-Statistik dan pengujian secara serempak digunakan uji F-statistik, dimana pengujian tersebut menggunakan alat bantu program Eviews 9.0. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperolah dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017. Variabel penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum kabupaten/ kota.

Hasil dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks gini, variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks gini, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini, dan variabel upah minimum kabupaten/ kota berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks gini. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Koefisien determinasi R^2 sebesar 78,41 menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 78,41% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 21,59% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan pada penelitian.

Saran dari hasil penelitian ini adalah (1) Pemerintah mengkaji kembali mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dalam menyiapkan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada, (2) Mengembangkan sektor pertanian yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan, (3) Meningkatkan mutu pendidikan di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, (4) Memberikan suatu pelatihan kepada pekerja di sektor informal guna meningkatkan pendapatan.

ABSTRACT

Nuriani, **Dini**. 2019. "The *Determinants of Income Inequality in Special Region of Yogyakarta in 2011-2017"*. Department of Development Economics. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor by Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

Keywords: Inequality of Income, Population, GRDP, Human Development Index, Regency/ City Minimum Wage.

Special Region of Yogyakarta is a province that has the highest Gini index number in Java and above the national average means income inequality in Special Region of Yogyakarta is worse than Indonesia. This is a serious problem because it will have an impact on people's welfare. Therefore this study aims to analyze the factors that influence income inequality in the Special Region of Yogyakarta.

The research method used is a quantitative method with panel data that is a combination of time series and cross sections tested with the Fixed Effect regression analysis method using the Ordinary Least Square (OLS) method. Partial testing used the t-Statistics test and simultaneous testing used the F-statistic test, where the test uses the tool Eviews 9.0 program. In this study using secondary data obtained from the website of the Statistics Indonesia of the Special Region of Yogyakarta in 2011-2017. The variables of this study are income inequality, population, GRDP, human development index, and district/ city minimum wages.

The results of this study are the variable population has a negative and not significant effect on the gini index, the GRDP variable has a negative and not significant effect on the gini index, the human development index variable has a negative and significant effect on the gini index, and the district/ city minimum wage variable has a positive and not significant to the gini index. Simultaneously all independent variables affect the gini index in the Special Region of Yogyakarta. The coefficient of determination R2 of 78.41 indicates that the independent variable studied was able to explain its effect of 78.41% on the dependent variable, while the remaining 21.59% was explained by other variables not included in the study.

Suggestions from the results of this study are (1) the Government reviews the policies in the field of labor that are more targeted in preparing employment for the existing workforce, (2) Developing the agricultural sector that can support economic growth in rural areas, (3) Increase the quality of education in each district / city in the Special Province of Yogyakarta such as inadequate facilities and infrastructure, (4) Providing training to workers in the informal sector to increase income.

.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KELULUSAN iii
PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
PRAKATA vi
SARI viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 13
1.3 Cakupan Masalah 14
1.4 Rumusan Masalah 15
1.5 Tujuan Penelitian 16
1.6 Manfaat Penelitian 16
1.7 Orisinalitas Penelitian 17
BAB II 19
KAJIAN PUSTAKA 19
2.1 Kajian Teori Utama 19
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 19
2.1.2 Teori Ketimpangan Pendapatan 23
2.1.3 Jumlah Penduduk 27
2.1.4 PDRB 28
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 28
2.1.6 Upah Minimum 31
2.2 Kajian Variabel Penelitian 32
2.2.1 Pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan 32

2.2.2 Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan 33
2.2.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan 34
2.2.4 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/ Kota terhadap ketimpangan pendapatan 35
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 36
2.4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 42
2.5 Kerangka Berfikir 46
2.6 Hipotesis 47
BAB III 48
METODE PENELITIAN 48
3.1 Jenis dan desain penelitian 48
3.2 Jenis Dan Sumber Data 48
3.3 Metode Pengumpulan Data 49
3.4 Variabel Penelitian 49
3.4.1 Definisi variabel penelitian 49
3.4.2 Definisi Operasional Variabel 50
3.5 Metode Analisis Data 52
3.5.1 Metode Analisis Regresi Data Panel 52
3.5.2 Model Regresi Data Panel 52
3.5.3 Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel 54
3.5.4 Uji Kesesuaian Model 55
3.6 Uji Asumsi Klasik 57
3.6.1 Uji Normalitas 57
3.6.2 Uji Multikolinieritas 58
3.6.3 Uji Heterokedastisitas 58
3.6.4 Uji Autokorelasi 59
3.7 Pengujian Statistik 60
3.7.1 Koefisien Determinasi R^2 (R-Square) 60
3.7.2 Uji Signifikansi Individu (Uji t) 60
3.7.3 Uji Secara Bersama-sama (Uji F) 61
BAB IV 62
HASIL DAN PEMBAHASAN 62
4.1 Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 62
4.2 Deskriptif Variabel Penelitian 63

4.2.1 Ketimpangan Pendapatan 63
4.2.2 Jumlah Penduduk 64
4.2.3 PDRB 65
4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66
4.2.5 Upah Minimum 67
4.3 Hasil Penelitian 68
4.3.1 Analisis Pemilihan Model 68
4.3.2 Analisis Regresi 70
4.4 Uji Statistik 72
4.5 Uji Asumsi Klasik 75
4.6 Pembahasan 79
BAB V 86
PENUTUP 86
5.1 Kesimpulan 86
5.2 Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Di Pulau Jawa (Dalam Milyar Rupiah) 3
Tabel 1.2 PDRB Per Kapita Menurut ADHK 2010 Di Pulau Jawa (Dalam Ribu Rupiah) 5
Tabel 1.3 Indeks Gini Di Pulau Jawa tahun 2011-2017 6

Tabel 2.1 Ukuran nilai indeks gini 26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 36

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017 (Orang) 65
Tabel 4.2 PDRB ADHK 2010 menurut Kab/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017 (Dalam Juta Rupiah) 66
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017 (indeks) 67
Tabel 4.4 Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017 (Dalam juta Rupiah) 68
Tabel 4.5 Uji chow 69
Tabel 4.6 Uji Hausman 69
Tabel 4.7 Hasil Fixed Effect Model 71
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi 73
Tabel 4.9 Uji t-Statistik 73
Tabel 4.10 Uji F-Statistik 74
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas 76
Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB per kapita menurut kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017 (Dalam Ribu Rupiah)..... 8
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017 (Dalam Juta Orang)..... 9
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017..... 10
Gambar 1.4 Upah Minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017..... 12

Gambar 2.1 Kurva Kuznet "U-Terbalik"..... 24
Gambar 2.2 Kurva Lorenz..... 25
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir..... 47

Gambar 3.1 Bagan pemilihan model data panel 56
Gambar 3.2 skema autokorelasi 59

Gambar 4.1 Indeks gini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia Tahun 2011-2017 64
Gambar 4.2 Uji Normalitas..... 76
Gambar 4.3 Hasil Skema Autokorelasi..... 78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data 93
Lampiran 2 Common Effect Model 94
Lampiran 3 Fixed Effect Model 95
Lampiran 4 Random Effect Model 96
Lampiran 5 Uji Chow 97
Lampiran 6 Uji Hausman 98
Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik 99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselarasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000). Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan, yaitu terjadinya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah dan antar kawasan yang menyebabkan kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah (Kuncoro, 2004).

Masalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan ekonomi adalah adanya perbedaan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (Tambunan, 2001).

Menurut Arsyad (1999), ada delapan hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang yaitu 1) meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan per kapita, 2) terjadinya inflasi yang tidak diikuti dengan pertambahan barang produksi, 3) ketidakmerataan

pembangunan antar daerah, 4) investasi pada padat modal lebih banyak dibandingkan investasi padat karya sehingga menyebabkan pengangguran bertambah karena pendapatan yang diperoleh relatif kecil, 5) mobilitas sosial yang rendah, 6) berlakunya kebijakan industri subtitusi impor yang mengakibatkan harga barang hasil industri menjadi naik dengan tujuan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, 7) ketidakelastisan permintaan barang-barang ekspor menyebabkan turunnya nilai tukar (*term off trade*) bagi negara berkembang, 8) berkurangnya industri-industri rumah tangga yang mengakibatkan pendapatan menjadi berkurang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Dimana Pulau Jawa merupakan sebagai penyumbang PDRB terbesar terhadap PDB Indonesia dibandingkan dengan pulau lainnya. Sehingga aktivitas perekonomian berpusat di Pulau Jawa dan menjadikan Pulau Jawa sebagai magnet perekonomian Indonesia. Pulau Jawa sendiri terdiri dari enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

Dalam suatu negara, antar provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Peningkatan distribusi dapat dilakukan dengan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk atau suatu masyarakat semakin meningkat. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembangunan

ekonomi secara berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan masyarakat.

Guna melihat keberhasilan pembangunan ekonomi dan mengukur kinerja serta efektivitas suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengukuran tersebut didasari oleh kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu di mana angka pertumbuhan tersebut menjadi *outcome* utama dari pembangunan ekonomi. Berikut merupakan data PDRB pulau Jawa.

Tabel 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Di Pulau Jawa (Dalam Milyar Rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	1.147.558	1.222.527	1.296.694	1.373.389	1.454.563	1.454.563	1.635.855
Laju Pertumbuhan	6,73	6,53	6,07	5,91	5,91	5,88	6,22
Jawa Barat	965.222	1.028.049	1.093.543	1.149.216	1.207.232	1.275.527	1.342.953
Laju Pertumbuhan	6,50	6,50	6,33	5,09	5,05	5,66	5,29
Jawa Tengah	656.268	691.343	726.655	764.959	806.765	849.313	849.313
Laju Pertumbuhan	5,30	5,34	5,11	5,27	5,47	5,27	5,27
DIY	68.049	71.702	75.627	79.536	83.474	87.688	92.300
Laju Pertumbuhan	5,21	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26
Jawa Timur	1.054.401	1.124.465	1.192.789	1.262.684	1.331.376	1.405.561	1.482.147
Laju Pertumbuhan	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,57	5,45
Banten	290.545	310.385	331.099	349.351	368.377	378.824	409.959
Laju Pertumbuhan	7,03	6,83	6,67	5,51	5,45	5,28	5,71
Indonesia	7.287.635	7.727.083	8.156.497	8.564.866	8.982.517	9.434.632	9.912.459
Laju Pertumbuhan	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari data pada tabel di atas dapat dililhat bahwa rata-rata nilai PDRB Indonesia sebesar 8.580.812 milyar rupiah. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional maka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai rata-rata terendah dibanding provinsi lain di pulau Jawa. Jika diurutkan

berdasarkan nilai PDRB periode 2011-2017 di pulau Jawa, provinsi DKI Jakarta berada di urutan teratas dengan rata-rata 1.381.523 milyar rupiah. Posisi kedua ditempati oleh provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 1.264.774 milyar rupiah kemudian disusul Jawa Barat sebesar 1.151.677 milyar rupiah dan Jawa Tengah. Dua provinsi dengan rata-rata PDRB terendah di pulau Jawa adalah Banten sebesar 348.362 juta rupiah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata 79.768 juta rupiah.

Walaupun dilihat dari angka PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terendah namun laju pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, yaitu pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,26 sedangkan laju pertumbuhan Indonesia sebesar 5,07. Namun PDRB per kapita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong rendah. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita.

Menurut Thamrin (2001) PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah maka semakin sejahtera penduduk daerah atau wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tinggi, jika pendapatan tinggi dan distribusi pendapatan merata antar daerah. Berikut merupakan data PDRB per kapita di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 PDRB Per Kapita Menurut ADHK 2010 Di Pulau Jawa (Dalam Ribu Rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	117 672	123 962	130 060	136 312	142 914	149 848	157 684
Laju Pertumbuhan	5,51	5,34	4,92	4,81	4,84	4,85	5,23
Jawa Barat	21 976	23 036	24 118	24 967	25 846	26 922	27 956
Laju Pertumbuhan	4,78	4,82	4,70	3,52	3,52	4,16	3,84
Jawa Tengah	20 053	20 950	21 845	22 819	23 887	24 966	26 098
Laju Pertumbuhan	4,40	4,47	4,27	4,46	4,68	4,52	4,53
DIY	19 387	20 183	21 038	21 868	22 688	23 566	24 534
Laju Pertumbuhan	3,94	4,11	4,23	3,95	3,75	3,87	4,11
Jawa Timur	27 864	29 508	31 092	32 702	34 272	35 971	37 720
Laju Pertumbuhan	5,66	5,90	5,37	5,18	4,80	4,96	4,86
Banten	26 548	27 716	28 911	29 847	30 813	31 781	32 933
Laju Pertumbuhan	4,53	4,40	4,31	3,24	3,24	3,14	3,63
Indonesia	30 112	31 519	32 867	34 119	35 360	36 720	38 169
Laju Pertumbuhan	4,64	4,67	4,27	3,81	3,64	3,85	3,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata nilai PDRB per kapita Indonesia sebesar 34 123 ribu rupiah. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional maka provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai terendah dibanding provinsi lain di pulau Jawa. Jika diurutkan berdasarkan nilai PDRB per kapita periode 2011-2017 di pulau Jawa, provinsi DKI Jakarta berada di urutan teratas dengan rata-rata 136 921 ribu rupiah. Posisi kedua ditempati oleh provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 32 732 ribu rupiah, kemudian disusul Jawa Barat sebesar 24 947 ribu rupiah dan Banten. Dua provinsi dengan rata-rata PDRB per kapita terendah di Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah sebesar 22 949 ribu rupiah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 21 894 ribu rupiah.

Kuznet menyatakan bahwa mula-mula pertumbuhan ekonomi pada tahap awal akan mengalami kenaikan disertai dengan ketimpangan distribusi

pendapatan yang tinggi pula sampai pada titik tertentu, kemudian pada tahap selanjutnya ketimpangan distribusi pendapatan akan mulai mengalami pemerataan. Teori ini kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznet "U Terbalik" karena terdapat perubahan dalam distribusi pendapatan selama kurun waktu tertentu (Todaro, 2006). Tabel indeks gini di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Indeks Gini Di Pulau Jawa tahun 2011-2017

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Indonesia
2011	0,402	0,380	0,357	0,423	0,351	0,394	0,388
2012	0,437	0,422	0,372	0,449	0,362	0,384	0,413
2013	0,404	0,406	0,390	0,416	0,368	0,380	0,406
2014	0,436	0,398	0,388	0,435	0,403	0,424	0,414
2015	0,421	0,426	0,382	0,420	0,403	0,386	0,402
2016	0,397	0,402	0,357	0,425	0,402	0,392	0,394
2017	0,409	0,393	0,364	0,440	0,415	0,379	0,391
Rata[2]	0,415	0,403	0,372	0,429	0,328	0,391	0,401

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa angka rata-rata indeks gini tertinggi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,429 dimana angka tersebut diatas angka rata-rata nasional. Menurut Badan Pusat Statistik, kisaran angka dalam indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Artinya, semakin mendekati angka 0 maka semakin rendah ketimpangan atau merata, dan sebaliknya semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi ketimpangan atau tidak merata.

Maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih parah dibandingkan Indonesia. Pada tahun 2011 angka indeks gini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,423 dan selalu

mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 0,440. Sedangkan rata-rata indeks gini provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta sebesar 0,415; Jawa Barat sebesar 0,403; Jawa Timur 0,328; Jawa Tengah 0,373 dan Banten sebesar 0,391.

Teori *trickle-down effect* diasumsikan bahwa pertumbuhan yang tinggi akan dengan sendirinya melahirkan pemerataan kesejahteraan. Artinya kemajuan yang diperoleh sekelompok masyarakat golongan atas akan menurun ke kelompok masyarakat golongan bawah yaitu melalui penciptaan lapangan pekerjaan serta berbagai peluang ekonomi lainnya. Sehingga akan menumbuhkan perekonomian yang merata kerena *output* hasil pertumbuhan ekonomi menjadi merata.

Namun hal ini tidak terjadi pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di mana angka indeks gini provinsi tersebut tiap tahun selalu mengalami peningkatan sehingga menandakan tidak meratanya pendapatan antar daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan per kapita antar daerah yang cukup timpang.

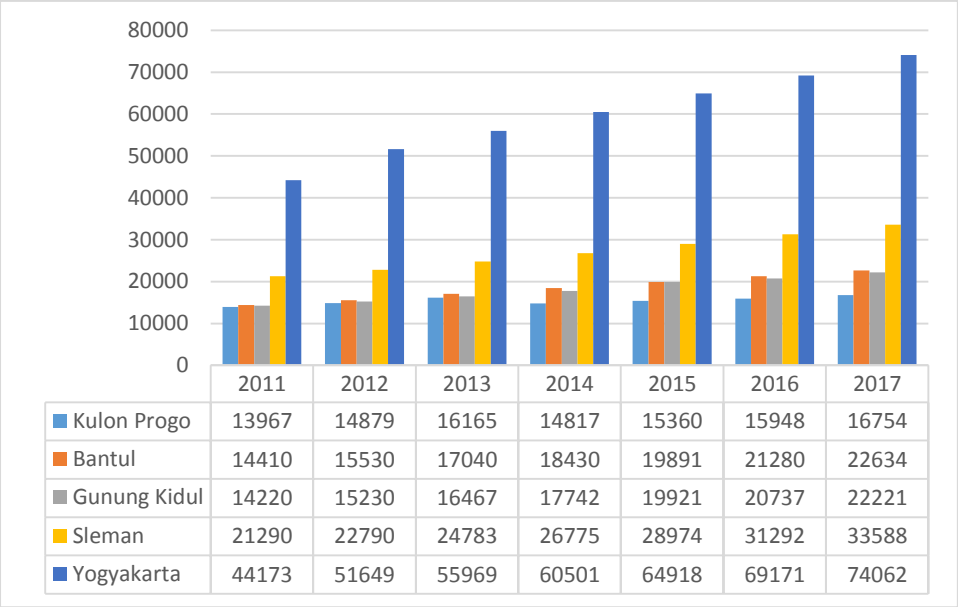

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	13967	14879	16165	14817	15360	15948	16754
Bantul	14410	15530	17040	18430	19891	21280	22634
Gunung Kidul	14220	15230	16467	17742	19921	20737	22221
Sleman	21290	22790	24783	26775	28974	31292	33588
Yogyakarta	44173	51649	55969	60501	64918	69171	74062

Gambar 1.1 PDRB per kapita menurut kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017 (Dalam Ribu Rupiah)

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan pendapatan per kapita antar kabupaten/ kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011-2017. Kota Yogyakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi yaitu sebesar 44 173 ribu rupiah pada tahun 2011 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar 74 062 ribu rupiah. Sedangkan PDRB per kapita terendah dimiliki Kabupaten Kulon Progo sebesar 13 967 ribu rupiah pada tahun 2011 dan pada tahun 2017 sebesar 16 754 ribu rupiah. Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan ada perbedaan geografis dan persebaran penduduk.

Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, semakin bertambahnya penduduk maka akan semakin memperluas pasar dan meningkatnya produktivitas yang

menyebabkan bertambahnya total output dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Maka akan menambah pula pendapatan daerah tersebut. Menurut hasil penelitian Bayhaqi (2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, semakin tinggi jumlah penduduk maka akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut merupakan data jumlah penduduk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada gambar 1.2

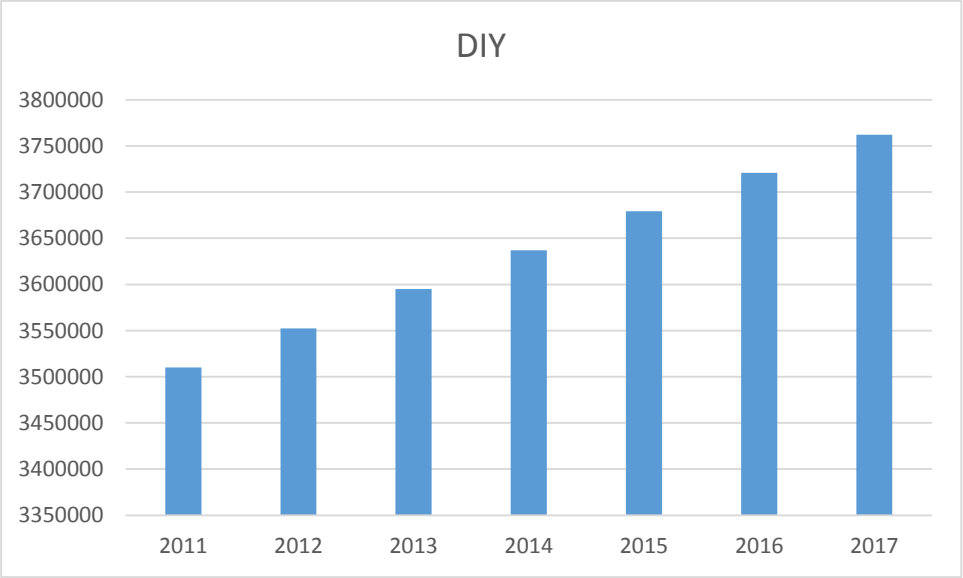

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017 (Dalam Juta Orang)
Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3.509.997 juta orang dan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar 3.762.167 juta orang. Adanya pertumbuhan penduduk

tersebut akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Selain pertumbuhan jumlah penduduk, salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah indeks pembangunan manusia. Faktor pendidikan adalah salah satu faktor mempengaruhi kualitas hidup suatu masyarakat. Diharapkan semakin tinggi kualitas hidup masyarakat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan yang terjadi. Modal manusia yang berkualitas akan berdampak pada kinerja ekonomi yang akan lebih baik (Brata, 2002).

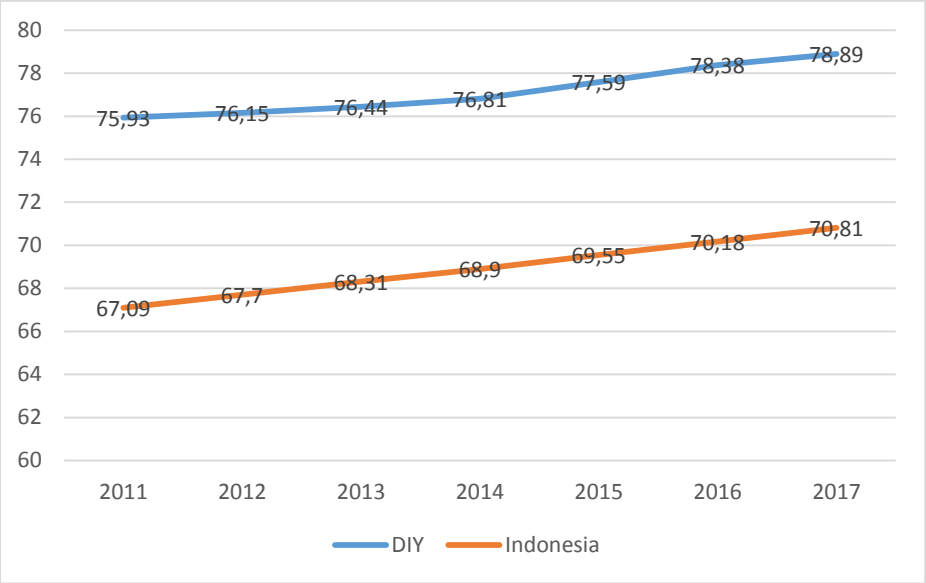

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017
Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sejak tahun 2011-2017. Indeks pembangunan manusia provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta lebih tinggi dibanding Indonesia yang berarti kualitas hidup penduduk di provinsi ini lebih baik dibanding Indonesia. Baiknya kualitas hidup masyarakat tersebut diharapkan akan berdampak pada pendapatan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya, ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh nilai indeks pembangunan manusia. Apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka akan menurunkan angka indeks Gini yang artinya ketimpangan pendapatan akan berkurang atau merata. Sehingga daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia rendah maka akan tertinggal dari daerah dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi (Putri, Amar, & Aiman, 2015).

Hasil penelitian Robby (2018) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang artinya semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah tersebut.

Timpangnya pendapatan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut disebabkan karena adanya perbedaan upah minimum yang ditetapkan oleh tiap kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya perbedaan pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka akan berpengaruh terhadap pemenuhan hidup setiap masyarakat.

Terdapat dua dampak distribusi upah yang diakibatkan oleh kebijakan upah minimum, yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Dampak

langsung dimana terjadi peningkatan upah dari pekerja yang mendapatkan upah rendah (kurang dari upah minimum) menjadi sesuai dengan upah minimum provinsi dan yang kedua dampak tidak langsung yaitu dimana kebijakan upah minimum akan meningkatkan upah pekerja yang pendapatannya lebih besar dari upah minimum (Campolieti, 2014).

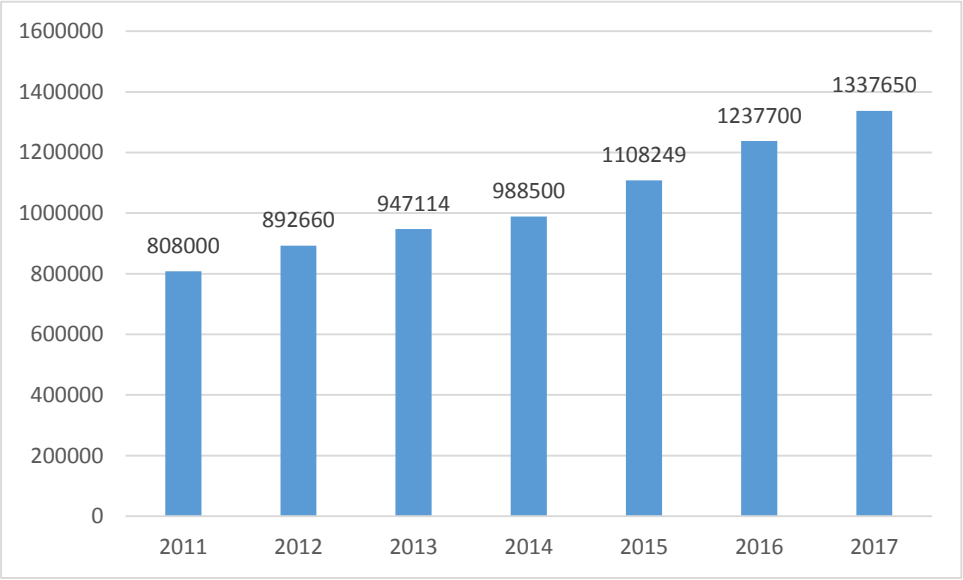

Gambar 1. 4 Upah Minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017
Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah.

Pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa tingkat upah minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 upah minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 808.000 ribu rupiah dan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar 1.337.650 juta rupiah Menurut penelitian Anshari dkk (2018) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ketika upah naik maka akan meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan permintaan barang

dan jasa disuatu daerah yang menandakan perbaikan perekonomian dan ketimpangan menjadi rendah antar daerah lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari nilai PDRB daerah/ wilayah tersebut dimana suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terdapat peningkatan nilai PDRB dari tahun sebelumnya. Namun tinggi rendahnya angka PDRB belum tentu mencerminkan adanya pemerataan distribusi pendapatan. Menurut Kuznet, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan cenderung mengalami ketimpangan yang tinggi sampai pada titik tertentu. Pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mulai membaik atau mengalami pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 0,21 atau 5,26 pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,05. Namun angka rata-rata indeks gini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,429 selama kurun waktu 2011-2017 yang mana angka

tersebut menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih parah dibandingkan Indonesia sebesar 0,401. Hal ini juga ditunjukkan dengan angka indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu meningkat dari kurun waktu 2011-2017. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat dilihat dari PDRB per kapita setiap daerah di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang timpang. Hal tersebut disebabkan karena penetapan upah minimum yang berbeda di setiap kabupaten/ kota. Sehingga dalam pengeluaran rumah tangga tergantung banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia juga merupakan indikator penting yang dapat mempengaruhi adanya ketimpangan.

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, terdapat permasalahan tingkat ketimpangan pendapatan serta banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya cakupan masalah di dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti agar lebih fokus. Penelitian ini fokus pada analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan melibatkan data seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Periode tahun yang digunakan yaitu dari 2011-2017. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada penelitian ini fokus pada empat variabel bebas yaitu 1)

Jumlah Penduduk, 2) PDRB, 3) Indeks Pembangunan Manusia dan 4) Upah Minimum Kabupaten/ Kota.

1.4 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi daerah satu dengan daerah lain biasanya memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Semakin besar perbedaan pembagian pembangunan, maka terdapat perbedaan pendapatan yang mengakibatkan terjadinya disparitas. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, berikut ini adalah rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/ kota terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan – rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/ kota terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan dalam bidang ekonomi. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan maupun penentuan arah

kebijakan, serta bagi pendidik maupun individu lainnya. Penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi peneliti, yaitu berupa pengalaman, dengan membandingkan antara ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun orisinalitas dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Bayhaqi (2018) yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kalimantan Barat tahun 2010-2015”. Penelitian yang dilakukan oleh Bayhaqi (2018) menggunakan variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan angka indeks gini sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari indeks pembangunan manusia, PDRB ADHK, jumlah penduduk dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan angka indeks gini sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum kabupaten/ kota. Objek penelitian ini berada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Periode tahun penelitian yang dilakukan oleh Bayhaqi (2018) selama 2010-2015 selama enam tahun sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode waktu tahun 2011-2017 selama tujuh tahun.

2. Penelitian ini juga pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) yang berjudul “Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005-2013”. Penelitian yang dilakukan Astuti (2015) menggunakan variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari indek pembangunan manusia, PDRB per kapita, populasi penduduk, dan SDA. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan indeks gini sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan manusia dan upah minimum kabupaten/ kota. Periode tahun penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) yaitu tahun 2005-2013 atau 9 tahun sedangkan pada penelitian ini selama 7 tahun yaitu 2011-2017.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Utama

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini artinya suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, tetapi melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Hal ini ditekankan pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1999).

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada setiap susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk pada suatu negara dalam jangka waktu panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

1. Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama yaitu mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam agar dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif sehingga mendorong pertumbuhan.
2. Pemerataan (*equity*), dalam hal ini memiliki implikasi dalam pencapaian tujuan yang kedua yaitu sumber daya berkelanjutan, oleh karena itu tidak boleh hanya fokus pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati oleh semua pihak dengan adanya pemerataan.
3. Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan yaitu pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi (Afrizal, 2013).

2.1.1.1 Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Menurut Adisasmita (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan Pendapatan

   Dalam keadaan yang ideal, dimana pendapatan mutlak didistribusikan secara adil yaitu 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi

teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Kemudian indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran keberhasilan ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan

produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut Tarigan (2004) ada tiga metode pendekatan yang digunakan dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu:

1. Pendekatan produksi

Merupakan perhitungan dengan menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi suatu negara selama satu periode tertentu.

2. Pendekatan pendapatan

Merupakaan perhitungan yang meliputi penjumlahan seluruh pendapatan yaitu upah, sewa, bunga dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

3. Pendekatan pengeluaran

Merupakan perhitungan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Dalam metode pendekatan pengeluaran ini dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.

Menurut Sukirno (2004) dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto dibentuk menjadi dua macam yaitu :

1. Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

Pengertian PDRB atas dasar harga konstan menurut BPS adalah keseluruhan nilai tambah produksi barang serta jasa yang dihitung dengan harga suatu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar yang mana dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar 2010. Dengan

menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian PDRB atas dasar harga berlaku menurut BPS ialah nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi secara keseluruhan yang mana nilai tambah yang diperoleh dihitung dengan harga pada setiap tahunnya yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar struktur perekonomian dan peranan dalam sektor ekonomi.

2.1.2 Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan pendapatan terjadi karena dampak balik lebih kuat dibandingkan dengan dampak sebar yang cenderung lemah di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999).

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Kuznet (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya,

distribusi pendapatan akan mengalami penurunan seiring dengan adanya pemerataan pendapatan. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva kuznet "U-terbalik", karena perubahan *longitudinal* (*time-series*) dalam distribusi pendapatan.

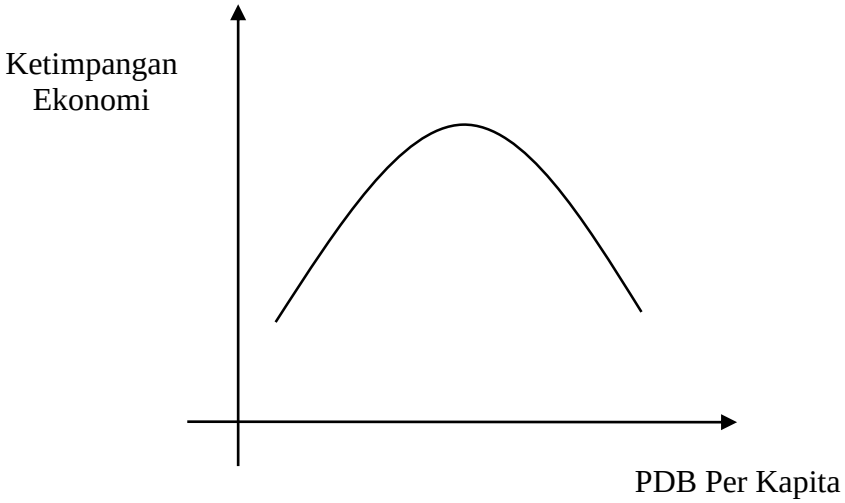

Gambar 2.1 Kurva Kuznet "U-Terbalik"

2.1.2.1 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

a. Menurut Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung presentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk.

1. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
2. Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
3. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

b. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya merepresentasikan presentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya merepresentasikan presentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada diagonal bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menunjukkan keadaan yang semakin buruk, dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Arsyad, 1997).

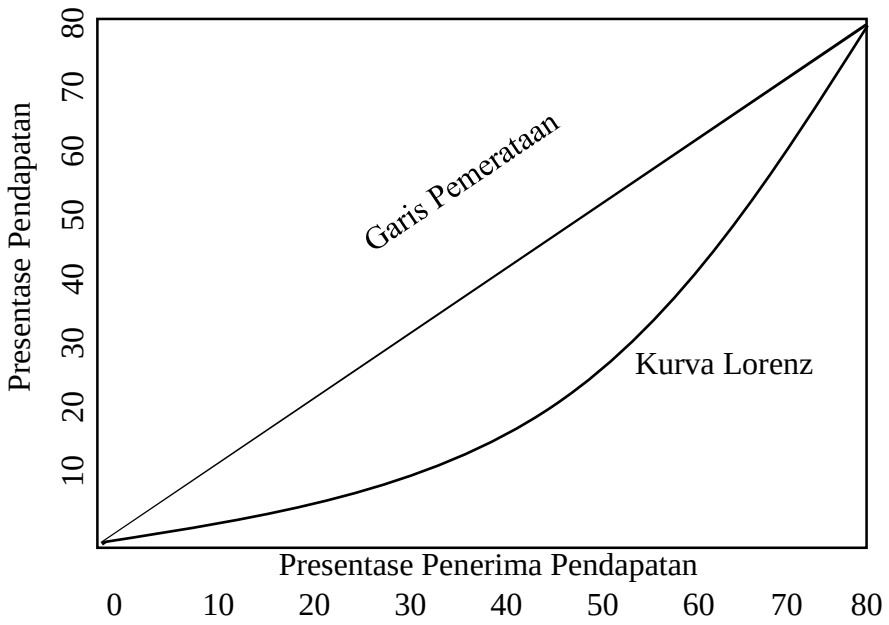

Gambar 2.2 Kurva Lorenz.

c. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai ukuran nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, semakin mendekati angka 0 maka daerah tersebut mengalami pemerataan. Sedangkan semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks gini adalah:

$$GR = 1 - \sum f_i \, [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

GR : Indeks Gini

f_i : jumlah penerima pendapatan kelas ke i (persen)

Y_i : jumlah kumulatif pendapatan pada kelas ke i (persen)

Tabel 2.1 Ukuran nilai indeks gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
>0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Terdapat empat kriteria pada koefisien indeks gini, antara lain yaitu:

1. Prinsip anonimitas dimana ukuran ketimpangan tidak tergantung pada apa yang telah menjadi keyakinan.

2. Prinsip independensi skala dimana ukuran ketimpangan tidak tergantung pada satuan ukur yang digunakan.
3. Prinsip independensi populasi dimana ukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penduduk.
4. Prinsip transfer yang memungkinkan ditribusi pendapatan baru yang lebih merata.

   Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi (Todaro, 2006).

2.1.3 Jumlah Penduduk

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith yang ada dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation*" yaitu penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan dengan adanya perluasan pasar maka akan mendorong tingkat spesialisasi. Dimana dengan adanya tingkat spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi sehingga mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1997).

2.1.4 PDRB

Menurut Hirschman (1958) dan Myrdal (1958) dalam Arsyad (1997) terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menyusun suatu rencana dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang melalui serangkaian strategi pembangunan. Dimana pada masa lampau, arah kebijakan pembangunan nasional lebih banyak difokuskan pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pertumbuhan yang tinggi maka akan tercipta peningkatan kapasitas produksi yang sekaligus diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat pula. Oleh sebab itu strategi kebijakan pembangunan nasional memberikan landasan pada asumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi akan dengan sendirinya melahirkan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat sesuai dengan teori *trickle-down effect.* Inti dari teori *trickle-down effect* adalah kemajuan yang diperoleh sekelompok masyarakat kalangan atas dengan sendirinya akan turun menetes ke kelompok masyarakat bawah melalui penciptaan lapangan pekerjaan serta berbagai peluang ekonomi lainnya, yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang mendukung terciptanya output sehingga hasil-hasil pertumbuhan ekonomi menjadi merata.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Human development atau pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (UNDP, 1990). Teori ini dicetuskan oleh UNDP untuk memperbaiki suatu konsep analisis sumber daya manusia yang sebelumnya berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita. Menurut UNDP (1990), pendapatan rata-rata tidak secara detail menggambarkan kondisi sumberdaya manusia di suatu wilayah. Hal

tersebut disebabkan karena kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin cenderung tinggi, sehingga penduduk yang pada dasarnya miskin akan terdata memiliki kesejahteraan lebih tinggi.

Terdapat beberapa premis dasar pada konsep pembangunan manusia ini antara lain yaitu:

1. Pada suatu pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pada pembangunan diartikan dalam memperbesar berbagai pilihan penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Dalam pembangunan manusia ini didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia dalam mencapai tujuan akhirnya terdapat empat hal utama yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Produktifitas

   Berkaitan dengan *human capital* yang dimiliki dan untuk meningkatkannya dibutuhkan investasi manusia.

b. Pemerataan

Dimana setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

c. Kesinambungan

yaitu pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini tetapi juga untuk masa depan.

d. Pemberdayaan

Dalam hal ini penduduk harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan serta proses yang akan menentukan kehidupan mereka nantinya.

Terdapat pengukuran pada pembangunan manusia yang disebut dengan *Human Developmen Index* (HDI) (UNDP, 1990). Komponen pengukuran tersebut terdiri dari tiga, yaitu:

1. Indeks Harapan hidup

Dengan melihat jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Kemudian memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel ini diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus kondisi hidup sehat masyarakat.

2. Indeks Hidup Layak

Diukur menggunakan PDRB per kapita yang dianggap menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Indeks Pendidikan

Mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan yaitu penduduk berumur 15 tahun ke

atas karena pada kenyataannya penduduk yang berusia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Indikator ini diharapakan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan.

2.1.6 Upah Minimum

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah yakni:

> "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Menurut teori ekonomi neo klasik menyatakan bahwa upah minimum akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dibandingkan menguranginya. Karena upah minimum menyebabkan non-pasar berperan

dalam menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja yang mana akan meningkatkan harga tenaga kerja sehingga upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebagian pekerja akan menjadi pengangguran.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya *"An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation"* mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi.

Maka semakin bertambah jumlah penduduk, semakin banyak pula total output yang dihasilkan dimana hal tersebut akan menambah pendapatan daerah/ wilayah tersebut. Sehingga akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan ekonomi dimana wilayah yang banyak penduduknya akan terus berkembang sedangkan wilayah yang peduduknya relatif sedikit akan tertinggal karena kurangnya faktor produksi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosa dan Sovita (2016) menunjukkan hasil bahwa populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian Bayhaqi (2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Astuti (2015) menyatakan bahwa populasi penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan karena populasi penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Setiap adanya pertambahan penduduk maka akan menyebabkan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan.

2.2.2 Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Dimana semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pendapatan penduduk dimana hal tersebut akan berdampak pada distribusi pendapatan.

Menurut teori *trickle-down effect* diasumsikan bahwa pertumbuhan yang tinggi akan dengan sendirinya melahirkan pemerataan kesejahteraan. Dalam artian kemajuan yang diperoleh sekelompok masyarakat kalangan atas dengan sendirinya akan turun menetes ke kelompok masyarakat bawah melalui penciptaan lapangan pekerjaan serta berbagai peluang ekonomi lainnya, yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang

mendukung terciptanya output sehingga hasil-hasil pertumbuhan ekonomi menjadi merata

Pada penelitian yang pernah dilakukan Astuti (2015) menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Besarria, dkk (2018) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian Damanik, dkk (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan

Indeks pembangunan manusia meningkat tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan manusia, yakni angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita. Sehingga indeks pembangunan manusia merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada pendapatan masyarakat sehingga menyebabkan distribusi pendapatan.

Menurut penelitian Bayhaqi (2018) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan memiliki pengaruh positif dimana semakin tinggi indeks pembangunan manusia maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian Astuti (2015) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan pada penelitian Robby (2018) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang artinya semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah tersebut.

2.2.4 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/ Kota terhadap ketimpangan pendapatan

Teori neoklasik yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum kabupaten/ kota akan memperbesar ketimpangan pendapatan, karena non-pasar akan berperan dalam menetapkan batas minimum di pasar tenaga kerja sehingga hal tersebut akan menyebabkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan terjadinya pengangguran. Upah minimum akan berdampak pada distribusi upah dengan dua cara yaitu dampak langsung dimana terjadi peningkatan upah dari pekerja yang mendapatkan upah rendah (kurang dari upah minimum) menjadi sesuai dengan upah minimum provinsi dan yang kedua dampak tidak langsung yaitu dimana kebijakan upah minimum akan meningkatkan upah pekerja yang pendapatannya lebih besar dari upah minimum (Campolieti, 2014).

Menurut penelitian Syilviarani (2017) menyatakan bahwa UMR berpengaruh signifikan dan positif dan penelitian Abdulah (2013) menyatakan bahwa variabel upah berpengaruh signifikan dan positif. Karena variabel UMR akan mengurangi arus migrasi khususnya bagi

masyarakat yang berpendapatan rendah dan menengah. Begitupun juga dengan penelitian Sungkar, dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel ketimpangan pendapatan dan upah minimum memiliki hubungan positif secara signifikan.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan terdapat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Metode penelitian	Hasil
1.	Judul : Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kalimantan Barat tahun 2010-2015 Nama Peneliti : Rizki Bayhaqi (2018)	Variabel dependen : Ketimpangan Pendapatan (indeks gini) Variabel independen : IPM, PDRB ADHK, Jumlah Penduduk, DAU	Data Panel	IPM berpengaruh positif dan signifikan, PDRB ADHK berpengaruh positif signifikan, jumlah penduduk positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan
2.	Judul : Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2005-2013 Nama Peneliti : Riska Dwi Astuti	Variabel Dependen : Ketimpangan pendapatan (indeks gini) Variabel Independen : IPM, PDRB per kapita, populasi penduduk,	Data Panel	IPM, berpenagruh positif dan signifikan, PDRB per kapita dan populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan SDA berpengaruh positif dan tidak signifikan

	(2015)	SDA		
3.	Judul : Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat Nama Peneliti : Muhammad Robby (2018)	Variabel dependen : ketimpangan pendapatan Variabel independen : investasi dan ipm	Data Panel	Variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel ipm berpengaruh negatif dan signifikan
4.	Judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah Nama Peneliti : Rusli Abdulah (2013)	Variabel Dependen : Ketimpangan distribusi pendapatan (indeks gini) Variabel independen : Urbanisasi, Dependensi rasio, Upah, Share output perekonomian pemilik modal	Data Panel	Share output perekonomian pemilik modal dan Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan urbanisasi berpengaruh negatif dan dependensi rasio berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distrbusi pendapatan
5.	Judul : Analisis Faktor-faktor yang Memepengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Nama Peneliti : Yeni Del Rosa, Ingra Sovita (2016)	Variabel dependen : Ketimpangan pendapatan (indeks gini) Variabel independen : PDRB per kapita, populasi penduduk, TPT, desentralisasi	Data Panel	PDRB per kapita, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan.

		fiskal		
6.	Judul Penelitian : Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8 Provinsi di Sumatera Nama Peneliti : Khairul Amri (2017)	Variabel dependen : Ketimpangan Pendapatan Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi	Panel Vector Autoregression (PVAR) dan Granger Causality Test	tidak terdapat hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya, dan ketimpangan pendapatan pada horizon waktu 2 tahun. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
7.	Judul Penelitian : Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Bali Nama Peneliti : Diah Pradnyadewi dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2017)	Variabel dependen : Ketimpangan distribusi pendapatan Variabel independen : IPM, Biaya infrastruktur, Investasi, Pertumbuhan ekonomi	Data Panel dengan Analisis Jalur	Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung dan signifikan. IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan
8.	Judul Penelitian: Pengaruh Upah Minimum	Variabel dependen : Ketimpangan	*Ordinary Least Square*	Kedua variabel memiliki hubungan positif secara

	Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Nama Peneliti: Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, Muhammad Nasir (2015)	Pendapatan Variabel independen : Upah Mininum	(OLS) atau Autoregressive	signifikan, artinya peningkatakan upah akan menaikkan angka ketimpangan pendapatan atau memperbesar terjadinya kesenjangan
9.	Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Nama Peneliti : Anggiat Mugabe Damanik, Zulgani, Rosmeli (2018)	Variabel dependen : Ketimpangan Pendapatan Variabel independen : Jumlah penduduk yang bekerja, investasi, pertumbuhan ekonomi	Analisis Jalur	Jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan, investasi berpengaruh positif tidak signifikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan
10.	Judul Penelitian : Inequality and Economic Growth in China Nama Peneliti : W. Adrian Risso & Edgar J Sanchez Carrera (2012)	Pertumbuhan ekonomi (PDB) Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	Kausalitas Granger (Uji Kointegrasi)	Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan berpengaruh signifikan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan baik sebelum reformasi ataupun sesudah. Dimana Pra periode (1952-1978) tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,33% dan rata-rata indeks gini sebesar

				0,27 maka menunjukkan ketimpangan rendah. Pasca periode (1979-2007) tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% dengan indeks gini sebesar 0,33.
11.	Judul Penelitian : Effect of Income Inequality on The Economic Growth of Brazilian states (An analysis using the cointegrated panel model) Nama Peneliti : Cássio Nobrega Besarria, Jevuks Matheus Araujo, Andrea Ferreira da Silva, Erika Fernanda Miranda Sobral and Thiago Geovane Pereira (2018)	Variabel dependen : Pertumbuhan ekonomi Variabel Independen : Koefisien Gini, PDB Per Kapita, Tingkat Pendidikan, Investasi, Ketidakstabilan politik, Korupsi, Energi	Data Panel (Uji Kointegrasi)	Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pembangunan, dan signifikan dalam efek jangka panjang.
12.	Judul Penelitian : A panel vector AutoRegression analysis of income inequality dynamics in each of the 50 states of USA Nama Peneliti : Olugbenga Onafowora, Oluwole Owoye (2017)	Variabel dependen : Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen : Pendapatan Per Kapita Kebebasan Ekonomi Tingkat Pendidikan Pengangguran Rasio Ketergantunga	Metode Panel dengan PVAR (*Panel Vector Autoregression*)	Variabel pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan, variabel pengangguran dan rasio ketergantungan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang, kebebasan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

		n		
13.	Judul Penelitian : The Impact of Collective Bargaining Legislation on Strike Activity and Wage Settlements Nama Peneliti : Campolieti M, Hebdon R dan Dachis B (2014)	Upah Minimum	Ordinary Least Square (OLS) linier probability model	kenaikan upah minimum akan berdampak signifikan pada transisi bekerja menjadi tidak bekerja pada pekerja muda yang memiliki upah rendah.
14.	Judul Penelitian: Income Inequality In The Philippines Nama Peneliti : Jonna P. Estudillo (1997)	Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan Variabel Independen: Populasi penduduk, Jumlah penduduk berusia tua, pendapatan rumah tangga	Regresi Linier Berganda	Variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan, variabel jumlah penduduk berusia tua berpengaruh negatif dan signifikan, variabel pendapatan rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan
15.	Judul Penelitian : The Relantionship Between Economic Growth and Income Distribution In Turkey and The Turkish Republics of Central Asia and Caucasia: Dynamic Panel Data Analysis With Structural Breaks	Variabel dependen : Indeks Gini Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi (GDP)	Data Panel (Uji Kointegrasi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (indeks gini)

	Nama Peneliti : Mehmet Mercan and Ozlem Arzu Azer (2013)			

2.4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayhaqi (2018) yaitu untuk variabel dependen sama-sama menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini) dan variabel independen IPM, PDRB, dan jumlah penduduk. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel independen upah minimum dan wilayah yang berbeda serta kurun waktu penelitian yang digunakan berbeda.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) yaitu wilayah penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini), serta variabel independen populasi penduduk dan IPM. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu kurun waktu yang berbeda yaitu 2011-2017 dan variabel independen upah minimum.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Robby (2018) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan Robby (2018) yaitu variabel independen menggunakan investasi.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdulah (2013) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan

(indeks gini) dan variabel independen upah. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu wilayah penelitian yang berbeda dan kurun waktu penelitian yang digunakan berbeda.

5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa dan Sovita (2016) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini) serta menggunakan variabel independen populasi penduduk. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu wilayah penelitian yang berbeda dan kurun waktu penelitian yang digunakan berbeda. Kemudian berbeda variabel independen upah minimum dan IPM
6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri (2017) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu wilayah penelitian yang berbeda dan kurun waktu penelitian yang digunakan berbeda serta variabel independen. Metode analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian ini yaitu pada Amri (2017) menggunakan *Panel Vector Autoregression* (PVAR) dan *Granger Causality Test* sedangkan pada penelitian ini hanya dengan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model*.
7. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyadewi dan Purbadharmaja (2017) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini) dan variabel independen IPM. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu wilayah penelitian yang berbeda dan kurun waktu penelitian yang digunakan

berbeda serta variabel independen. Metode analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian ini yaitu pada Pradnyadewi dan Purbadharmaja (2017) menggunakan data panel dan analisis jalur sedangkan pada penelitian ini hanya dengan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model*.

8. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sungkar dkk (2016) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini) dan variabel independen yaitu upah minimum. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu metode analisis yang digunakan Sungkar dkk (2016) *menggunakan metode ordinary least square autoregressive* sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model.*
9. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik, dkk (2018) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan ini yaitu metode analisis yang digunakan Damanik, dkk (2018) menggunakan metode analisis jalur sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model.*
10. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Risso dan Carrera (2012) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu metode analisis pada Risso dan Carrera (2012) menggunakan *Kausalitas Granger*

(Uji Kointegrasi) sedangkan pada penelitian ini hanya dengan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model*.

11. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Besarria, dkk (2018) yaitu variabel independen menggunakan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu metode analisis menggunakan data panel dengan Uji Kointegrasi sedangkan pada penelitian ini hanya dengan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model*.
12. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Onafowora dan Owoye (2017) yaitu variabel dependen menggunakan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu metode analisis pada Onafowora dan Owoye (2017) menggunakan menggunakan *Panel Vector Autoregression* (PVAR) sedangkan pada penelitian ini hanya dengan analisis regresi data panel dengan metode *fixed effect model*.
13. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Campolieti et al. (2014) yaitu terdapat variabel upah minimum. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu metode yang digunakan Campolieti et al. (2014) adalah metode at risk, gap, dan gap variant dimana estimasi yang dilakukan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) linier probability model.
14. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Estudillo (1997) yaitu terdapat variabel populasi penduduk. Sedangkan perbedaan

penelitian ini yaitu Estudillo (1997) menggunakan regresi linier berganda sedangkan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel.

15. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mercan dan Ozlem (2013) yaitu variabel dependen menggunakan indeks gini dan variabel independen menggunakan pertumbuhan ekonomi (PDB/ GDP). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu Mercan dan Ozlem (2013) menggunakan Uji Kointegrasi.

2.5 Kerangka Berfikir

Berdasarkan data Indeks Gini, ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011-2017 terus mengalami peningkatan dan lebih parah dibandingkan Indonesia. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu aspek ketimpangan pendapatan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan tersebut. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas dapat dibuat kerangka berpikir yang menjadi acuan di dalam penelitian ini, yaitu “Diduga adanya pengaruh jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan manusia dan upah minimum kabupaten/ kota terhadap ketimpangan pendapatan”. Berikut kerangka berpikir yang disajikan dalam bentuk skema sederhana gambar 2.3.

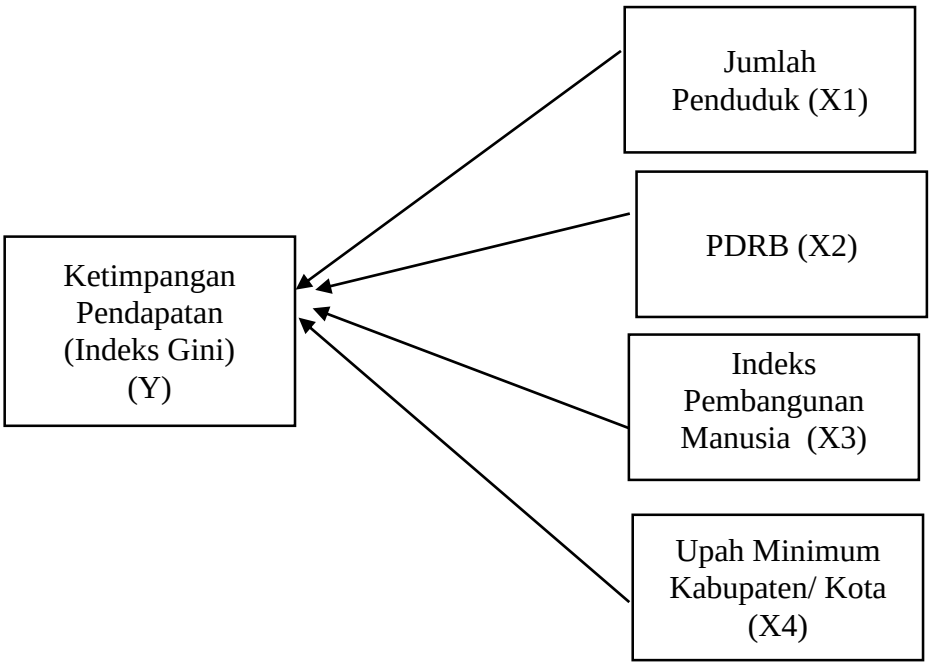

Keterangan :

⟶ : pengaruh

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir dan kajian dari penelitian terdahulu, maka muncul hipotesis penelitian. Berikut merupakan penjelasan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Variabel Jumlah Penduduk (Jmlpndk) berpengaruh negatif terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017.
2. Variabel PDRB (PDRB) berpengaruh negatif terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2017.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2017.
4. Variabel Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) berpengaruh negatif terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2017.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pada tahun 2011-2015 masih terdapat banyak jumlah penduduk miskin yang meningkat tiap tahunnya. Selain itu, terdapat banyak penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2017 sebanyak 843.017 ribu orang dan banyaknya pengangguran pada tahun 2017 sebesar 64.017 ribu orang
2. Variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan geografis antar kabupaten/ kota.
3. Variabel IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terbukti dengan jumlah tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki pendidikan terakhir rata-rata SMA dan Sarjana.
4. Variabel Upah Minimun Kabupaten/ Kota mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks gini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena masih banyak penduduk yang berpendidikan rendah bekerja di sektor informal yaitu PKL (pedagang kaki

lima). Oleh karena itu, melihat dari penghasilan penduduk jauh berbeda dengan penghasilan yang bekerja pada sektor formal. Kondisi ini terjadi pada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

5.2 Saran

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran yaitu dengan mengeluarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dalam menyiapkan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat mengembangkan sektor pertanian yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Sleman. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat.
3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang sudah dikenal dengan kota pendidikan yaitu Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah lebih meningkatkan mutu pendidikan di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti pada sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai, aspek kurikulum, peserta didik, lingkungan sekolah, pembiayaan, kelembagaan, serta peran masyarakat, kemudian tidak kalah pentingnya yaitu tenaga pengajar yang berkualitas.
4. Wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak penduduk yang berpendidikan rendah bekerja di sektor informal yaitu PKL (pedagang kaki lima) dibandingkan sektor formal. Oleh karena

itu, untuk mengurangi adanya ketimpangan pendapatan, pemerintah wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan suatu pelatihan kepada pekerja di sektor informal seperti menyebarkan informasi seputar kegiatan usaha, pengembangan wawasan, dasar pengelolaan usaha, dan pemanfaatan peluang usaha.

DAFTAR PUSTAKA

(UNDP), U. N. D. P. (1990). *Global Human Development Report*. New York: Oxford University Press: Human Resources Department.

Abdulah, R. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah. *Jejak (Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan)*, *6*(1), 42–53.

Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amri, K. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan: Panel data 8 provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Manajemen Teknologi*, *1*(1), 1–11.

Anggiat Mugabe Damanik, D. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah Vol. 7 No.1*, *7*(1), 15–25.

Arsyad. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Arsyad. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Edisi Pert). Yogyakarta: BPFE.

Astuti, R. D. (2015). *Analisis determinan ketimpangan distribusi pendapatan di daerah istimewa yogyakarta periode 2005-2013*. 1–75.

Baldwin, R. E. (1986). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi* (S. Dianjung, ed.). Jakarta: PT Bina Aksara Jakarta.

Bayhaqi, R. (2018). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kalimantan Barat Tahun 2010-2015*.

Besarria, C. N., Araujo, J. M., Da Silva, A. F., Sobral, E. F. M., & Pereira, T. G. (2018). Effects of income inequality on the economic growth of Brazilian states. *International Journal of Social Economics*, *45*(3), 548–563.

Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Brata, A. G. (2002). Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *7 No 2*, 113–122.

Campolieti, M., Hebdon, R., & Dachis, B. (2014). The impact of collective bargaining legislation on strike activity and wage settlements. *Industrial*

Relations, *53*(3), 394–429.

Estudillo, J. P. (1997). Income inequality in the world. *Income Inequality In The Philippines 1961*, *1*(March), 68–95.

Fitrah, A. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011. In *Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi*. Makassar: Universitas Hasanudin. Makassar.

Gujarati, D.N. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika* (Edisi Keli; R. . Mangunsong, ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati, Damodar N. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hirschman. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.

Jhingan, M. . (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Myrdal, G. (1958). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Duckworth.

Onafowora, O., & Owoye, O. (2017). A panel vector AutoRegression analysis of income inequality dynamics in each of the 50 states of USA. *International Journal of Social Economics*, *44*(6), 797–815. https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0154

Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, *6*(2), 255–285.

Risso, W. A., & Carrera, E. J. S. (2012). Inequality and economic growth in China. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, *5*(2), 80–90.

Robby, M. (2018). Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Kalimantan Barat. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Vol 7 No 2*.

Rosa, Y. Del, & Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pedapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, *II*(4), 41–52.

Sari Nurmalisa Sungkar, N. M. N. (2016). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah*, *3*(2), 40–53.

Sekaran. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Simon, K. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, *XLV March*.

Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

SYILVIARANI, A. T. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015. *Publikasi Ilmiah*.

Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Edisi Revi). Jakarta: Bumi Aksara.

Thamrin, S. (2001). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Ketu). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Todaro, M. P. dan S. C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Kese). Jakarta: Erlangga.

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia.